

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017

Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie

sri_rahayu@uwks.ac.id

Dosen pada Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Judul penelitian rencana aksi daerah pengarusutamaan gender kabupaten Mojokerto. Tujuan penelitian (1) Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi karena adanya indikator yang terukur; (2) Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Metode Analisa Kebijakan Pengarusutamaan Gender. Alur kerja analisis gender (*gender analysis pathway-GAP*) yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program pembangunan.

Hasil penelitian strategi pengarusutamaan gender diimplementasikan pada seluruh tahap pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan. Implementasi pada tahap perencanaan pembangunan melalui : 1) Penguatan prasyarat yang terdiri dari 7 aspek yaitu dukungan politik, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem data dan informasi, alat analisis serta dukungan masyarakat sipil; 2) Sektor/Lembaga menyusun RKA/KL di mana menggunakan data terpilah, melalui proses musrenbang, dan melewati tahapan analisis gender; 3) Bappeda kabupaten Mojokerto menyusun tolok ukur dan indikator kinerja; 4) Adanya komitmen dalam penerapan anggaran berimbang.

Implementasi PUG pada tahap pelaksanaan pembangunan adalah : 1) Memastikan fungsi manajemen pelaksanaan pembangunan yang responsif gender melalui koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, bimbingan teknis dan supervisi; 2) Tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program yang responsif gender ditinjau dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Kata kunci: Analisis, Kebijakan, Pengarusutamaan, Gender.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi. Pengarusutamaan gender merupakan strategi alternatif bagi usaha percepatan tercapainya kesetaraan gender karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari nafas budaya di dalamnya.

Kebijakan PUG juga di atur dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang menegaskan

bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi lintas bidang dalam pembangunan selain Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akses perempuan di bidang politik di Indonesia juga masih tersendat, seperti terlihat dari jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi dewan perwakilan. Pada sektor pendidikan, data menunjukkan betapa jauhnya *Gap* untuk yang buta huruf antara laki-laki dan perempuan. Jelas saja hal ini semakin membuat posisi perempuan semakin marjinal. Pada sektor tenaga kerja, masih terjadi ketimpangan dalam hal akses ataupun upah. Data pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjelaskan bahwa akses kerja laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Menanggulangi kemiskinan perempuan pada dasarnya akan memberikan efek domino terhadap penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan, sebagaimana telah dideskripsikan dalam indikator diatas bahwa kemiskinan terjadi dikarenakan belenggu yang dihadapi perempuan terkait dengan budaya patriarki, kekeliruan dalam menafsirkan perintah agama, struktur sosial, politik dan ekonomi, kultur masyarakat, sampai pada produk kebijakan yang dilahirkan.

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan betapa pentingnya perspektif dan analisis gender dimasukkan dalam penyusunan program pengentasan kemiskinan dan juga dalam perumusan intervensi program pengentasan kemiskinan pada umumnya dan kemiskinan perempuan pada khususnya. Untuk itu, pemerintah harus mengintegrasikan perspektif gender dalam strategi dan programnya, aksi intervensinya, serta dalam pemantauan dan evaluasinya, yang semuanya harus melibatkan kaum perempuan.

Tujuan Penelitian

1. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi karena adanya indikator yang terukur .
2. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan strategi PUG.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Gender dan Jenis Kelamin

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

Pengertian Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan

laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal. Jadi konsep kesetaraan adalah konsep filosofis yang bersifat kualitatif, tidak selalu bermakna kuantitatif.

Pengertian Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara agregat ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki.

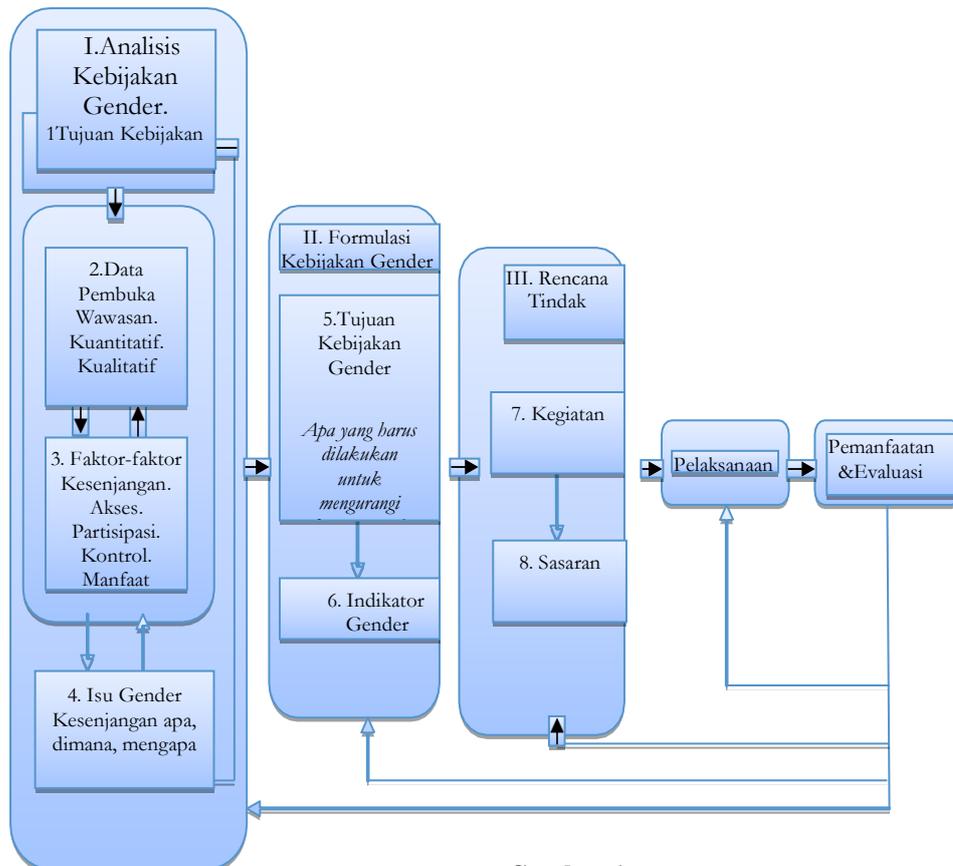
METODOLOGI

Analisa Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Bappenas bersama-sama dengan WSP II dan CIDA mengembangkan alur kerja analisis gender (*gender analysis pathway-GAP*) yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program pembangunan (Ismi, 2009:136).

Dengan menggunakan GAP, para perencana pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*) serta sekaligus menyusun rencana/kebijakan/program pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. Alur kerja analisis gender digambarkan sebagai berikut:

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017
(Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)



Gambar 1.
Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway – GAP)

ANALISA SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Untuk melihat perkembangan sektor pendidikan di Kabupaten Mojokerto ini maka dapat kita lihat dari aspek seperti : Buta Aksara; Angka Partisipasi Kasar; Angka Partisipasi Murni; angka putus sekolah maupun rasio murid dan guru dan rasio murid sekolah.

a. Angka Buta Aksara (Keaksaraan Fungsional/KF)

Berdasarkan amanat UUD 1945 pemerintah berkewajiban menyelenggarakan program pendidikan nasional yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu sejak dasawarsa 70-an pemerintah telah mencanangkan program pemberantasan buta huruf (B3B = bebas tiga buta) yang ditunjang dengan program Inpres Sekolah Dasar. Selanjutnya, berdasarkan Undang- Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Pendidikan Nasional, pemerintah mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang pelaksanaannya dimulai sejak 1994.

Salah satu ukuran dasar untuk melihat keberhasilan pendidikan adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk usia 10 tahun ke atas. Menurut data BPS dan Diknas kabupaten Mojokerto, penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Mojokerto yang telah melek huruf dan dapat membaca/menulis

huruf latin dan atau lainnya mencapai 96,18 % di atas rata-rata Jawa Timur yang hanya 91,47% dan angka buta huruf sebesar 3,82 %, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto hampir bebas dari buta huruf. Persentase penduduk yang melek huruf, dan persentase penduduk yang masih buta huruf, atau tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya di Kabupaten Mojokerto yang berusia 10 tahun ke atas cukup baik. Persentase yang telah melek huruf menunjukkan adanya keberhasilan program pemberantasan buta huruf (Bebas 3 Buta atau Pemberantas Buta Aksara), melalui program Kejar Paket A, B, maupun C bagi penduduk, terutama yang telah berusia dewasa/lanjut.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011-2015

NO	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	PAUD	-	91,33	92,50	92,50	99,65
2	APK SD/MI	100,46	100,47	100,50	92,50	104,95
3	APK SMP/MTs	97,20	97,20	97,30	100,50	106,40
4	APK SMP/MA/SMK	74,45	74,90	75,20	77,30	87,37

Sumber Data: LKPJ Kabupaten Mojokerto tahun 2011-2015

Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka partisipasi kasar untuk jenjang SD/MI dari tahun ketahun mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 angka partisipasi kasar mengalami penurunan sebesar 8%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs angka partisipasi kasar terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Sedangkan untuk jenjang SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Perlu dilakukan pencermatan bahwasanya untuk penghitungan angka partisipasi kasar berdasarkan jumlah siswa seluruhnya dibanding jumlah siswa per kelompok usia jenjang pendidikan. Dalam hal angka partisipasi kasar menurun, bisa disebabkan karena ada siswa/pelajar pada jenjang pendidikan bersekolah di wilayah selain kabupaten atau terdapat siswa/pelajar yang bersekolah di wilayah Kabupaten Mojokerto.

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak

digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Data nasional tahun 2014 sampai tahun 2016 menunjukkan bahwa APS berkecenderungan meningkat pada semua kelompok umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tidak ada perbedaan pencapaian yang nyata antara laki-laki dan perempuan disemua jenjang pendidikan, bahkan pada kelompok usia 7-12 thn dan 13-15 tahun anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Sementara apabila kita mencermati perbedaan antar wilayah perdesaan dan perkotaan, wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi pencapaiannya apabila dibanding perdesaan, hal ini terjadi disemua jenjang pendidikan. Artinya didalam rangka meningkatkan angka pencapaian APS nasional, wilayah perdesaan perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Mojokerto menunjukkan kondisi yang baik pada Sekolah Dasar, dan SLTP dan tapi pada SLTA masih menunjukkan kondisi yang perlu ditingkatkan.

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa untuk usia sekolah 7 -12 tahun, akses laki-laki maupun perempuan sudah cukup tinggi, sehingga arah kebijakan pendidikan kedepan hendaknya lebih ditujukan pada peningkatan kualitas. Untuk usia 13-15 tahun relatif lebih rendah dibandingkan usia 7-12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan anak-anak usia 7-12 tahun ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi perlu mendapatkan perhatian, sehingga ketersediaan sarana prasarana pendidikan di jenjang SLTA diperlukan untuk meningkatkan akses pendidikan lanjutan bagi anak-anak. Selanjutnya, dari tabel diatas dapat pula dilihat bahwa partisipasi usia sekolah di jenjang pendidikan yang semakin tinggi, cenderung menurun.

Ketenaga Kerjaan/Ekonomi

Pergeseran sektor pertanian ke sektor industri dan jasa dalam perekonomian berpengaruh pada pergeseran pemanfaatan tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi pergeseran tersebut lebih banyak terjadi pada tenaga kerja perempuan, dalam bentuk penyerapan banyak tenaga kerja perempuan di sekoatr industri dan jasa.

Keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi, dilatarbelakangi oleh keharusan bekerja atau mereka memilih untuk bekerja. Sebagian perempuan yang "harus bekerja" adalah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, sehingga melibatkan diri di dalam kegiatan ekonomi secara aktif, sedangkan bagi perempuan yang memilih untuk bekerja dan memiliki latarbelakang ekonomi menengah ke atas, mereka bekerja tidak lain hanya didorong oleh motivasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat kehidupan sosial

ekonomi rata-rata penduduk di dalam suatu masyarakat, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung semakin tinggi.

a. Penduduk Usia Kerja

Pada tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun keatas) di Kab Mojokerto berjumlah 827.126 orang. Berarti jumlah usia kerja meningkat 1,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah angkatan kerja seluruhnya tahun 2015 sebesar 575.330 orang dan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 552.002 orang.

Jumlah angkatan kerja naik 3,96% sejalan dengan jumlah penduduk yang bekerja naik 3,70% dibandingkan tahun 2014. Jika jumlah kesempatan kerja lebih besar di bandingkan jumlah angkatan kerja, maka tingkat pengangguran di Kabupaten Mojokerto dapat ditekan.

Tabel 2
Indikator Ketenagakerjaan Kab Mojokerto 2016

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah Bekerja	521.593	532.294	552.00
Angkatan Kerja	538.456	553.405	575.33
Penduduk Usia Kerja	790.417	816.260	827.12
TPT (%)	3,13	3,81	4,0
TPAK (%)	68,12	67,80	69,5

b. Tingkat Pengangguran

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2015 naik sebesar 6,30% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Tingkat Partisipasi Kerja hanya naik 2,60%. Kondisi ini kurang baik, sebab banyak tenaga kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Kondisi idealnya bahwa kenaikan TPT harus sejalan dengan peningkatan TPAK. Angka TPT meningkat mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja banyak yang sedang mencari kerja dengan berbagai alasan. Bisa saja karena tidak mampu meneruskan pendidikan, mengurus rumah tangga, atau sedang mempersiapkan usaha. Bahkan banyak yang menganggur (tidak ada kegiatan).

c. Lapangan Usaha

Penduduk yang bekerja di Kabupaten Mojokerto dikelompokkan dalam 3 sektor yaitu, sector pertanian, sector industry (mencakup penggalian, industry, listrik dan konstruksi) serta jasa-jasa (mencakup sector perdagangan, transportasi/komunikasi. keuangan dan jasa-jasa). Jumlah penduduk yang bekerja di sector pertanian mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menjadi tantangan pemerintahan daerah di masa datang.

Dibandingkan tahun 2014, jumlah penduduk yang bekerja di sector pertanian turun sekitar 1,02%. Hal ini mengindikasikan bahwa sector pertanian kurang dimintai masyarakat. Penduduk yang bekerja di sector industry jumlahnya juga menurun sebedar 2,26 %. Jumlah pekerja di sector ini sangat fluktuatif sesuai kondisi sector industry. Sebaliknya yang bekerja di sector jasa-jasa selalu meningkat dan selama 2013-2015 naik 8,96%.

d. Kemiskinan

Berdasarkan data yang di dapat dari BPS bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Mojokerto menurun dari tahun 2014 sebesar 11%, turun di tahun 2015 menjadi 10,57% dan kembali sedikit naik 0.04% di tahun 2016 menjadi 10,61%.

Namun demikian, ada perubahan status dari sangat miskin menjadi miskin. Ada sekitar 80 ribu Kepala Keluarga (KK) dari total penduduk di Kabupaten Mojokerto (1,1 juta jiwa) yang masuk masuk kategori miskin.

RENCANA AKSI

Isu Strategis

A. Bidang Pendidikan

Isu gender di bidang pendidikan meliputi :

Angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa di Kabupaten Mojokerto partisipasi usia sekolah di jenjang pendidikan yang semakin tinggi cenderung menurun. Dan untuk Angka Partisipasi Kasar Perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini berarti Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan anak-anak usia 7 – 12 tahun ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi perlu mendapatkan perhatian, sehingga ketersediaan sarana prasarana pendidikan di jenjang SLTP dan SLTA diperlukan untuk meningkatkan akses pendidikan lanjutan bagi anak-anak.

- Angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa di Kabupaten Mojokerto partisipasi usia sekolah di jenjang pendidikan yang semakin tinggi cenderung menurun. Dan untuk Angka Partisipasi Kasar Perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini berarti Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan anak-anak usia 7 – 12 tahun ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi perlu mendapatkan perhatian, sehingga ketersediaan sarana prasarana pendidikan di jenjang SLTP diperlukan untuk meningkatkan akses pendidikan lanjutan bagi anak-anak.
- Untuk pendidikan tinggi yang ditamatkan, terdapat ketimpangan angka antar laki-laki dan perempuan. Persentase semakin meningkat dari SD ke SMP tetapi dari SMP ke SMA semakin menurun
- Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto sudah menunjukkan hasil yang baik dimana pada jenjang pendidikan SMP dan SMA rata-rata lama sekolah normal.

B. Bidang Kesehatan

Isu gender di bidang kesehatan meliputi :

- Angka kematian Bayi dan Balita mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 11,3 per 1000 kelahiran menjadi 12,7 per 1000 kelahiran
- Angka Kematian Ibu tergolong rendah yaitu 22 org dari 100.000 kelahiran hidup
- Terjadi penurunan kasus dari tahun 2014 ke tahun 2015, tetapi meningkat pada tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran dari masyarakat untuk memeriksakan diri ke sarana kesehatan, selain itu pesatnya jumlah kasus juga didasarkan dengan adanya mobil layanan keliling untuk tes darah secara sukarela, sehingga penemuan penderita HIV cepat terdeteksi dan segera tertangani.

C. Bidang Ketenagakerjaan/ Bidang Ekonomi

Isu gender di bidang Ketenagakerjaan/ekonomi, meliputi :

- Kabupaten Mojokerto mempunyai 80 ribu KK yang masih tergolong miskin. Tingkat kemiskinan tidak mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2014 hingga 2016
- Dalam mendukung perluasan lapangan kerja, masyarakat yang bergerak di usaha mikro khususnya laki-laki, sering menghadapi kendala dalam mengakses permodalan. Berbagai persyaratan lembaga perbankan atau lembaga kredit, menyebabkan kelompok usaha kecil sering menjadi kendala yang utama. Padahal seperti diketahui mikro berperan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal, dan berpotensi meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) perempuan dalam keluarga.
- Masih lemahnya perlindungan bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan. Misalnya penerapan hak cuti haid dan melahirkan yang masih sering menjadi persoalan bagi buruh perempuan. Beberapa perusahaan menerapkan aturan, ketika seorang pekerja perempuan menikah, maka dia harus berhenti bekerja. Begitu juga hak cuti haid, sebagian besar pekerja perempuan tidak bisa mendapatkan hak tersebut karena alasan perusahaan tempat mereka bekerja yang kurang respon.
- Masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro masih mengalami kesulitan dalam mengakses pasar (pemasaran hasil produksinya). Kelompok usaha mikro harus diperhadapkan dengan kekuatan pemilik modal yang memiliki kemampuan mengakses pasar yang lebih luas. Kondisi ini yang kadang membuat usaha mikro kurang mampu berkembang.

D. Bidang Publik

Isu gender di bidang publik, meliputi :

- Keterwakilan perempuan di legislatif masih 16,0 % belum mencapai 30%. Demikian juga jumlah jaksa di kabupaten Mojokerto
- Fungsi dan Peran POKJA PUG yang belum optimal
- Akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan perencanaan sangat terbatas.

E. Kekerasan Perempuan dan Anak

Isu gender di bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :

- Masih marak terjadi kasus KDRT dan juga kekerasan terhadap anak ataupun perbuatan pencabulan. Kedua kasus tersebut mendominasi jumlah kasus social yang di tangani oleh Pem Kab Mojokerto , yakni sebanyak 15 kasus
- Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan belum tersedia secara optimal. Pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan, masih terbatas
- Masih adanya diskriminasi bagi perempuan pekerja khususnya di perusahaan, terkait hak cuti haid dan melahirkan.

Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender adalah : 1) Peningkatan kualitas kehidupan perempuan di semua bidang; 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut menurunkan angka kematian ibu dan anak serta peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi termasuk dalam keluarga berencana; 3) Peningkatan akses kaum perempuan untuk berusaha di bidang ekonomi produktif, termasuk mendapatkan modal pelatihan usaha, program perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar sehingga dapat mendorong lahirnya kemandirian kaum perempuan dalam berwirausaha; 4) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, sehingga tercipta keseimbangan perempuan diberbagai sektor; 5) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak guna mencegah terjadinya diskriminasi, eksploitasi, kekerasan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan keseimbangan.

KESIMPULAN

Strategi pengarusutamaan gender diimplementasikan pada seluruh tahap pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan.

1. Implementasi pada tahap perencanaan pembangunan melalui : (1) Penguatan prasyarat yang terdiri dari aspek yakni dukungan politik, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem data dan informasi, alat analisis serta dukungan masyarakat sipil; (2) Sektor/Lembaga menyusun RKA/KL di mana menggunakan data terpilah, melalui proses musrenbang, dan melewati tahapan analisis gender; (3) Bappeda kabupaten Mojokerto menyusun tolok ukur dan

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017
(Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)

- indikator kinerja; (4) Adanya komitmen dalam penerapan anggaran berimbang.
2. Implementasi PUG pada tahap pelaksanaan pembangunan adalah : (1) Memastikan fungsi manajemen pelaksanaan pembangunan yang responsif gender melalui koordinasi, sinkronisasi, sinergis, bimbingan teknis dan supervisi; (2) Tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program yang responsif gender ditinjau dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
 3. Implementasi PUG pada tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan adalah (1) sektor/ lembaga melaporkan tentang pelaksanaan pembangunan yang responsif gender (LAKIP) (2) BPMPKB melakukan analisis format LAKIP melaporkannya kepada Sektor/Lembaga sebagai *feed back* dan kepada Bupati sebagai bentuk akuntabilitas; (3) Membuat tambahan format LAKIP baru sesuai tolok ukur/indikator kinerja yang responsif gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilina, D.W., 2015, Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia (Studi Analisis Isi UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional), Yogyakarta, Thesis: Universitas Gadjah Mada.
- Byrne, B. and Baden, S., 1995, *Gender, Emergencies and Humanitarian Assistance*, Brighton: Bridge (Development-Gender).
- Creswell, John W., 2012, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr. A. Darsono Sudiyo, MSI, 2017, *Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <dkk.lan.go.id/.../Kebijakan-Pelaksanaan-Pengarusutamaan-Gender->(diakses 21 Agustus 2017)
- Genderpedia, 2011, Kebijakan Buta Gender dan Sadar Gender, <<http://genderpedia.blogspot.co.id/2011/11/kebijakan-buta-gender-dan-sadar-gender.html>> (diakses 21 Mei 2017).
- Hubeis AVS., 2010, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, Bogor: IPB Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, ,

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017
(Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/4f9aa-buku-pmbg-2016-min.pdf>< diakses 21 Mei 2017>

Midgley, J., Tracy, M.B., & Livermore, M., 1999, *The Handbook of Social Policy*, USA: Sage Publications.

Miftahuddin,etal(trj.), 1996, Pisau Bedah Gender: Tujuh Kerangka Analisis Gender dan Alat Perencanaan. Terjemahan bebas dari A Tool Kit: Concept and Frameworks For Gender Analysis and Planning, OXFAM UK/I Gender Learning Team.

Nugroho, R., 2011, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurhayati, E., Silawati, H., Astuti, S., Indrasari, M.I., Widiastuti, R., 2008, *Gender di Mata Birokrat (Hasil Penelitian Persepsi Pembuat Kebijakan di DIY tentang Gender Tahun 2002)*, Yogyakarta: Rifka Annisa Media Research and Training Center.

Puspitawati, H., 2012, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: PT IPB Press.

Simatauw M., Simanjuntak L., dan Kuswardono PT., 2001, *Gender & Pengelolaan Sumber daya Alam*, Yogyakarta: Yayasan PIKUL.

Tifa Fondation, 2017, *Ketimpangan Gender dan Akses Ekonomi dan Politik*,<<http://www.tifafoundation.org/ketimpangan-gender-dan-akses-ekonomi-politik/>> di akses tanggal 21 Mei 2017.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretta Jajuk Hanafie)

MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN				
						2018	2019	2020	2021	2022
Peraturan Perundang-Undangan (Persyaratan Implementasi PUG)										
A. Pengintegrasian peraturan perundangan	Implementasi peraturan perundangan di Kabupaten Mojokerto	Melakukan advokasi kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif ttg implementasi peraturan perundangan di Kabupaten Mojokerto	Terbitnya Perda, Perbup, SK bupati tentang Implementasi PUG	Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan masyarakat (perempuan dan laki-laki)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DP2KBP 2 ▪ Bappeda ▪ Biro/Bag. Hukum ▪ LSM, Ormas ▪ Media ▪ PT 	X				
B. Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan strategi PUG dalam pembangunan	Peningkatan KIE PUG	Optimalisasi sosialisasi/advokasi PUG	Seminar, lokakarya, workshop, diskusi publik, buku/leaflet/brooklet	Pejabat pemerintahan termasuk para aparat penegak hukum dan masyarakat (perempuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DP2KBP 2 ▪ BAPPEDA ▪ DIKNAS 	X				

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretta Jajuk Hanafie)

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN				
						2018	2019	2020	2021	2022
				n dan laki-laki)						
Kelembagaan										
Meningkatkan kelembagaan dan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender	1.Peningkatan koordinasi dan kewenangan kelembagaan PUG	Melakukan review pembentukan POKJA dan Focal Point dan menetapkan rencana kerja tahunan PUG tahun 2018	Penetapan Rencana Kerja Tahunan sehingga terwujud pola kerja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	POKJA dan Focal Point	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • DP2KBP 2 	X				
	2.Peningkatan Kinerja antar kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Pengembangan dan penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender di kabupaten Mojokerto	Adanya kebijakan dan system implementasi PUG di Kabupaten Mojokerto	Penentu kebijakan di Kabupaten Mojokerto	Bupati/Camat					
	3.Penyusunan anggaran yang responsif gender	Menyusun anggaran yang responsif gender	Program/ Kegiatan yang responsif gender di Kabupaten Mojokerto	Seluruh OPD	OPD &TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)	X				

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretta Jajuk Hanafie)

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN				
						2018	2019	2020	2021	2022
					Kab. Mojokerto					
	4.Peningkatan kapasitas SDM pada kelembagaan pengarusutamaan gender	a. Pelatihan/TO T bagi OPD Kabupaten Mojokerto pada kelembagaan pengarusutamaan gender	SDM paham dan mampu melakukan analisis gender di OPD Kabupaten Mojokerto	Seluruh OPD)	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • OPD • Pemkab 	X				
		b. Menyebarluaskan panduan teknis pelaksanaan PUG	Panduan teknis perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	Seluruh OPD	<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • DP2KBP 2 	X				
	5.Penyusunan sistem data dan informasi gender	Menyusun sistem data & informasi gender di Kabupaten Mojokerto	Sistem data& informasi gender di Kabupaten Mojokerto	Data & profil gender di Kabupaten Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> • BPS • OPD 	X				
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender										
A. Percepatan kebijakan/program/	Pengintegrasian pengarus	Menggunakan data terpilah	RPJMN, RPJMD dan Renstra, dan	Seluruh OPD	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • DP2KBP 	X				

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretta Jajuk Hanafie)

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN				
						2018	2019	2020	2021	2022
kegiatan yang responsif gender	utamaan gender dalam dokumen perencanaan di OPD	gender dan profil gender dalam dokumen perencanaan OPD	DPA OPD yang responsif gender		2 • OPD					
B. Optimalisasi monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang responsif gender	Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG	Menyusun sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di OPD	Pedoman sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di OPD	Seluruh OPD	Independen yang kompeten dan profesional					
	Menyusun sistem pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan	Mengintegrasikan dimensi gender dalam sistem pelaporan yang telah ada di OPD	Laporan tentang pelaksanaan PUG yang terperinci	Seluruh OPD	• Bappeda • DP2KBP 2 • OPD • Independen					
D. Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan PUG	Sosialisasi/advokasi pelaksanaan	Memfasilitasi dan pendampingan	Tokoh agama, Tokoh adat, aktifis pemuda dan	Tokoh agama, Tokoh	• DP2KBP 2 • OPD	X				

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretta Jajuk Hanafie)

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN				
						2018	2019	2020	2021	2022
	Pengarusutamaan gender	pelaksanaan perngarusutamaan Gender di masyarakat	perempuan mampu menjadi fasilitator pengarusutamaan gender	adat, aktifis pemuda dan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • LSM, Ormas • Media 					